

LUKISAN ANALITIK TENTANG ETOS FILANTROPI MUHAMMADIYAH
SULAWESI TENGGARAPADA ERA AKHIR ORDE BARU DALAM
PERSPEKTIF GERAKAN SOSIAL

Muhammad Alifuddin

Institut Agama Islam Negeri Kendari

Email: proposlalif@gmail.com

Nurjannah

Institut Agama Islam Negeri Kendari

Email: nurjannahnur76@gmail.com

Abstrak

Penelitian bertujuan mendeskripsikan secara *Analitik tentang Etos Filantropi Muhammadiyah di Sulawesi Tenggara pada Akhir Era Orde Baru*. Data-data penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen. Seluruh data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan paradigma Miles dan Huberman. Merujuk pada data serta analisis yang dilakukan diperoleh kesimpulan (1). Realitas infrastruktur gedung Muhammadiyah (GDM) adalah fakta tentang karakter kerja keras, persatuan dan kekuatan berderma elemen Muhammadiyah. Etos berderma elemen organ ini terus bergerak, kendati mereka berada dalam ruang struktur sosial politik tertutup. (2) Daya filantropi elemen Muhammadiyah didorong oleh semangat *berfastabiqulkhairat* yang dinarasikan oleh aktor melalui framing yang elegan sehingga memicu semangat berkompetisi anggota Muhammadiyah dalam membangun monumen kebaikan untuk semua. (3). Ruang struktur politik tertutup serta minimnya sumber pendanaan, bukan hambatan bagi Muhammadiyah merealisasikan infrastruktur sebagai pusat menkoordinasikan kegiatan organisasi. Realitas ini menyajikan fakta tentang kuatnya etos filantropi warga Muhammadiyah. Implikasi umum dari penelitian ini adalah bahwa semangat *berfastabiqul khairat* terbukti dapat memicu etos filantropi elemen sosial.

Kata kunci: *Etos filantropi, Muhammadiyah, Orde Baru*

Abstract

The research aims to describe analytically the ethos of Muhammadiyah Philanthropy in Southeast Sulawesi at the End of the New Order Era. The data of this research were obtained through in-depth interviews, observation and document review. All data obtained were analyzed using the Miles and Huberman paradigm. This research concludes: (1). The reality of the Muhammadiyah building infrastructure (GDM) is a fact about the character of hard work, unity and charitable strength of Muhammadiyah elements. The philanthropic ethos of this organ element continues to move, even though they are in a closed socio-political structure,(2). The philanthropic power of Muhammadiyah elements is driven by the spirit of *fastabiqul khairat* narrated by actors through elegant framing, which triggers the spirit of competition among Muhammadiyah members in building monuments of goodness for all, (3). The closed political structure space and the lack of funding sources are not obstacles for Muhammadiyah in realizing its infrastructure as a coordinating center for organizational activities. This reality presents facts about the strong philanthropic ethos of Muhammadiyah citizens. The general implication of this research is that the spirit of *fastabiqul khairat* is proven to trigger the philanthropic ethos of social elements.

Keywords: *Philanthropic ethos, Muhammadiyah, Orde Baru*

Pendahuluan

Salah satu organ sosial di Indonesia yang ranah geraknya berada dalam ruang filantropi adalah Muhammadiyah. Hafidz Arfandi menyebutkan bahwa, filantropi identik dengan gerakan Muhammadiyah (2017, h. 119). Oleh karena itu, umumnya komunitas Muhammadiyah tidak terlalu tertarik pada polemik keagamaan, Muhammadiyah lebih cenderung pada kerja-kerja kemanusiaan, kederwanan, cinta dan peduli pada sesama (Amar,2017,h. 2). Kuatnya citra kepedulian dalam gerakan Muhammadiyah, mendorong warga organisasi ini membangun ribuan Amal Usaha untuk didedikasikan pada rakyat Indonesia. Menjamurnya Amal Usaha Muhammadiyah di Nusantara membuktikan bahwa sejumlah orang yang memilih untuk berada dalam barisan Muhammadiyah adalah subyek berkarakter filantropi (Hajrianto, 2105).

Berangkat dari berbagai realitas yang disebutkan oleh para peneliti tentang fenomena aktivitas filantropi di Muhammadiyah, mendorong penulis untuk menyajikan data tentang gerak etos filantropi Muhammadiyah di Sulawesi-Tenggara. Yang membedakan penelitian ini dengan kajian-kajian sebelumnya, karena penelitian ini berupaya menampilkan fenomena etos filantropi warga Muhammadiyah diujung akhir masa berkuasanya Orde Baru. Kajian ini penting mengingat pada masa tersebut organ-

organ sosial yang sehaluan dengan Muhammadiyah mendapat intaian yang ketat dari pemerintah. Pemerintah dengan kuasa otoriternya berupaya ingin menundukkan seluruh elemen organ sosial masyarakat agar patuh pada alur nalar politik yang dibangunnya. Yang menarik adalah bahwa dalam suasana ketertutupan politik; Muhammadiyah Sulawesi-Tenggara dapat membangun sejumlah bangunan “monumental” (untuk ukuran zamanya) di atas landasan etos filantropi.

Penelitian ini adalah upaya memberikan lukisan analitik dengan berfokus pada implementasi gerakan filantropi yang tergambar pada ruang sejarah komunitas Muhammadiyah dalam menjalankan dan mendirikan pusat aktivitas dakwah, yang ditelaah dari sudut pandang teori gerakan sosial. Sudut pandang inilah yang membedakan kajian ini dengan kajian lainnya yang mengangkat tentang tema filantropi Muhammadiyah sebagaimana kajian: Faozan Amar: *Implementasi Filantropi Islam di Indonesia*, (2017). Demikian pula dengan kajian Hafidz Arfandi yang menulis tentang: *Motif dan Strategi Gerakan Filantropi Muhammadiyah*. Ketertarikan penulis mengangkat tema etos filantropi Muhammadiyah di akhir masa kekuasaan Orde Baru, karena berbagi aktivitas dan pembangunan pusat aktivitas dakwah Muhammadiyah tersebut direalisasikan dalam sebuah momen atau situasi politik yang kurang kondusif bagi segala varian gerakan dakwah, yaitu dalam masa penghujung kekuasaan otoriter Orde Baru. Eloknya dalam suasana politik represif dan keterbatasan sumber daya ekonomi serta akses politik, etos filantropi Muhammadiyah menggeliat untuk selanjutnya mengubah momen menjadi momentum dan kemudian menghasilkan monumen.

Metode

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik dengan menggunakan data-data kualitatif. Seluruh data dalam penelitian ini diperoleh melalui serangkaian wawancara mendalam kepada sejumlah informan yang terdiri dari tokoh dan simpatisan Muhammadiyah, serta semua pihak yang berkaitan dengan fokus penelitian. Selain wawancara, datapun diperoleh melalui pengamatan dan studi terhadap sejumlah dokumen (arsip/notulen rapat organisasi). Data-data yang terkumpul kemudian dianalisis berdasarkan alur atau struktur metode Miles dan Huberman (Miles & Huberman, 1986, h.20).

Kerangka Teori

Filantropi berasal dari Bahasa Yunani, terdiri dari dua kata “*philaen*” yang berarti cinta dan “*anthropos*” yang bermakna manusia. Filantropi adalah laku atau tindakan seseorang atau (individu) atau sekelompok orang yang mencintai sesama manusia serta nilai kemanusiaan, sehingga menyumbangkan waktu, uang dan tenaganya untuk menolong orang lain. (Hilman, 2017, h.30). Dalam banyak kasus gerakan filantropi bersifat alamiah dilakukan untuk membantu orang lain tanpa harus memandang agama, suku dan budaya. Hal inilah yang dimaksudkan dengan mencintai sesama manusia, yang distilahkan sebagai “filantropi”. (Nasution, dkk, 2019, h.280). Filantropi menyiratkan pada aktifitas sosial bersifat jangka panjang yang berfungsi memberdayakan masyarakat dan dapat menghapus persoalan-persoalan sosial di tengah masyarakat (Fawziyah, 2016, h.17), atau bahkan untuk melakukan transformasi paradigmatic dalam rangka melakukan perubahan terhadap realitas keadaban sosial. (Widiyanto, 2018, h.193). Dengan demikian filantropi secara fundamental ideas, merupakan gerakan sosial yang dilakukan atas dasar prinsip kemanusiaan dan pemberdayaan. Dalam konteks gerakan sosial, gerakan filantropi dapat dipandang sebagai sebagai usaha-usaha kolektif yang memiliki cakupan luas, bertujuan melakukan perubahan pada lembaga sosial tertentu, dan atau menciptakan suatu sistem yang memberdayakan. Dalam Implementasinya, gerakan sosial itu melibatkan sejumlah orang yang terkoordinir dalam sebuah organisasi, baik formal maupun non-formal untuk mendesain dan melakukan perubahan, atau sebaliknya menantang perubahan itu sendiri (David, h.322). Oleh karena itu, hakikat gerakan sosial adalah sebuah gerakan yang didasarkan atas tindakan kolektif dalam rangka mencapai tujuan sesuai yang dicita-citakan oleh kelompok yang melakukannya.

Mengakaji gerakan filantropi dalam dinamika pusran gerakan sosial politik, bukan tanpa alasan, temuan Arfandi menyebutkan dalam banyak kasus gerakan filantropi yang berkembang di Indonesia atau bahkan di belahan dunia ini lainnya berkecenderungan memanfaatkan gerakan filantropi untuk menggerogoti legitimasi Negara. Hal ini berbeda dengan yang ditunjukkan Muhammadiyah. Gerakan filantropi Muhammadiyah menjadi kekuatan penyeimbang dan penopang ketika negara dengan sengaja mengabaikan kewajibannya menyediakan layanan kesejahteraan pada masyarakat seperti di era kolonial. Dengan demikian komitmen Muhammadiyah dalam mendorong kesejahteraan tidak kontraproduktif dengan tujuan lahirnya negara maupun *welfare state*. (Arfandi, 2016, h.

152). Dalam konteks itulah menjadi menarik menelisik etos gerakan filantropi Muhammadiyah di akhir kekuasaan Orde Baru dalam perspektif atau teori gerakan sosial.

Dalam konsepsi kajian politik, gerakan sosial dilakukan dalam kerangka *state centerdness*, karena itu gerakan sosial hanya menjadikan Negara sebagai target dari gerakan, dasar argumennya adalah mengingat negaralah satu-satunya otoritas (*source of power*). Dalam perkembangan kajian gerakan sosial selanjutnya, pendapat ini banyak ditentang atau dikritik, terutama setelah lahirnya ide mengenai *new social movement* yang berorientasi atau berpihak pada isu-isu lingkungan, gender, dan preferensi sosial. Gerakan *new social movement* dalam kenyataannya tidak hanya focus pada Negara sebagai target, perubahan orientasi tersebut. Realitas ini kemudian melahirkan definisi baru tentang gerakan sosial (*social movement*) (Tilly, 1978, h.17). David Snow misalnya mendefinisikan gerakan sosial sebagai gerakan kolektif yang terorganisir dengan tujuan untuk melakukan penentangan terhadap otoritas yang ada, baik yang bersifat structural (institusional) maupun kultural. Pandangan Snow memberikan perspektif bahwa gerakan sosial tidak hanya menjadikan Negara sebagai sasarannya, karena dalam kenyataan sosial, Negara bukan satu-satunya *source of power and authority*, tetapi juga berbagai otoritas dari berbagai institusi dan *cultural meaning* yang menjadi bagian dari masyarakat (Snow, 2004, h.9). Oleh karena itu, menurut Snow gerakan sosial; adalah suatu bentuk gerakan yang menentang *institutional authority* (apakah ia berada dalam area politik seperti Negara atau lainnya seperti korporasi, agama atau pendidikan) atau bentuk-bentuk *cultural authority* seperti sistem kepercayaan atau praktek dari sistem kepercayaan tersebut. (ibid)

Quintan Wiktorowicz smenyebutkan ada tiga hal yang dipandang sangat menentukan dalam sebuah gerakan sosial, yaitu: 1). *Political opportunity spaces/ Structure (POS)*, adalah salah satu variable yang memberi penjelasan tentang relasi yang terjadi antar perubahan dalam struktur dan sistem politik dengan upaya mobilisasi dalam suatu gerakan (Benfoord, 2000, h.286). Keadaan yang terjadi dalam lingkungan struktur politik memberikan sebuah kesempatan tersendiri bagi gerakan sosial untuk bisa muncul dan berkembang. Eishinger menyebutkan POS (Opp, 2004, h.70) adalah ruang yang bersifat multidimensi yang tidak hanya atau semata-mata dapat memberi kesempatan bagi tumbuh kembang gerakan sosial dalam satu masa, tetapi juga dapat menghambat berkembangnya sebuah gerakan sosial. Kondisi terakhir terjadi manakalah *political*

structure bersifat represif. Namun secara umum dapat disimpulkan, bahwa hambatan dan atau suatu kesempatan bagi suatu gerakan sosial dapat dipilah menjadi dua yaitu: Pola tertutup (ketertutupan politik) berpengaruh signifikan untuk menjadi hambatan bagi tumbuh kembang gerakan sosial, sedangkan dalam system sosial politik yang terbuka berpotensi memberi ruang nafas yang lebih segar bagi tumbuh kembang sebuah gerakan sosial. Dalam sebuah lingkungan yang iklim politiknya kondusif akan membuka kesempatan yang lebar bagi tumbuhnya gerakan sosial, sedangkan pada situasi lingkungan dengan iklim politik tertutup akan semakin mempersempit atau bahkan menutup ruang tumbuh kembang gerakan sosial (*ibid*). 2). *Resource mobilization theory* tak kalah pentingnya. Disinilah gerakan sosial diaktualkan. Ketidakpuasan terhadap kondisi yang ada tidak berarti apa-apa tanpa adanya sekelompok orang yang mau melakukan kegiatan mobilisasi yang tentu saja bersandar pada sumber daya yang ada. 3). *Social framing*, Adalah kerangka interpretasi yang memungkinkan orang untuk menempatkan, memahami, mengidentifikasi dan menamai peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sekitar mereka maupun dunia secara keseluruhan” (Snow, h.21). *Frame* berperan membantu orang menyarikan peristiwa dan kejadian menjadi pengalaman bermakna, kemudian mengorganisasi pengalaman tersebut dan memberi panduan untuk bertindak.

Temuan Hasil Penelitian

Sejarah masyarakat Sulawesi-Tenggara menemukan bukti empirik terkait tapak jejak gerakan dakwah Muhammadiyah yang mulai dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Sulawesi-Tenggara antara tahun 1929-30 (Depdikbud,1979). Bukti tapak jejak sejarah yang terbentang dari ujung paling utara Kolaka hingga Kendari di wilayah daratan, hingga ke wilayah Kepulauan Buton dan Muna menyajikan data, betapa kader-kader Muhammadiyah sejak zaman sebelum kemerdekaan hingga detik ini terus bergerak berupaya menerangi jalan hidup masyarakat di daerah ini, sekalipun dengan kadar yang fluktuatif (Ahmad Aljufri, wawancara).

Dalam tradisi Muhammadiyah, giat dakwah merupakan gerakan berkesinambungan yang niscaya terus digelorakan oleh generasi pelanjut dari organ ini. Muhammadiyah tanpa dakwah bukanlah Muhammadiyah, karena elan vital Muhammadiyah adalah dakwah itu sendiri. Demikianlah garis gerak utama organisasi ini yang diamanahkan oleh

KH.Ahmad Dahlan sebagai *fouders*, bahwa seluruh bentuk kegiatan dan usaha yang dibuat oleh warga Muhammadiyah harus dilakukan dalam kerangka dakwah Islam (Nasir,2018). Dalam upaya menyemarakkan kegiatan dakwah sebagaimana dimaksud, para penggiat persyarikatan dari masa ke masa tidak pernah lelah berusaha, terus mendorong kemajuan umat/masyarakat melalui dakwah guna mencerahkan masyarakat (Abdullah,wawancara). Berbagai upaya dilakukan dalam kerangka dakwah dengan beragam pendekatan dan pola yang disepadankan dengan dinamika sosial budaya masyarakat dimana gerakan dakwah tersebut diejawantahkan. Lokomotif gerakan dakwah Muhammadiyah di Sulawesi-Tenggara, pada tahun 1990-an dilakukan dalam suasana keterbatasan dan tantangan politik yang represif, namun dalam suasana dan kondisi tersebut elemen organ ini berazam menginisiasi pembangunan sebuah gedung yang diorientasikan sebagai pusat aktivitas dan gerak dakwah yang diperankan oleh Muhammadiyah. (ibid)

Upaya warga persyarikatan membangun sebuah sarana yang peruntukannya diorientasikan sebagai kantor sekaligus sebagai pusat aktivitas organisasi dapat dimengerti, mengingat organisasi sekelas Muhammadiyah yang diklaim sebagai persyarikatan besar, menjadi sangat ironis jika tidak memiliki kantor sebagai pusat kordinasi beragam aktivitas yang direncanakan. Perlu diketahui bahwa sejak terbentuknya kepengurusan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi-Tenggara terpisah dari PWM Sul-Selra tahun 1985 sampai 1997, organ ini belum memiliki kantor sendiri. Realitas ini meniscayakan kepada setiap Ketua PWM terpilih, untuk mengikhlaskan rumah kediamannya, tidak hanya difungsikan sebagai sekretariat plus Kantor, tempat melaksanakan rapat, tetapi juga sekaligus sebagai tempat melayani dan menjamu tamu organisasi. Realitas Muhammadiyah sebelum tahun 1999, menyajikan fakta, bahwa jika persyarikatan menyelenggarakan rapat dengan jumlah peserta yang besar atau ada kunjungan dari Pengurus Pusat, maka solusi penyelenggaraannya adalah dengan memanfaatkan sekolah- sekolah Muhammadiyah atau Masjid yang pengurusnya berasal dari unsur Muhammadiyah (Kamiluddin,wawanacara). Sebagai contoh kasus dapat disebutkan; tatkala Amin Rais selaku Ketua PP Muhamadiyah berkunjung ke Sulawesi -Tenggara tahun 1995, beliau dijamu dan diterima di Masjid Al-Mawaddah. Di tempat inilah teretus kritik beliau kepada tokoh Muhammadiyah yang hadir saat itu. Ucapan beliau adalah “kalau saya lihat tokoh tokoh yang hadir sebagai warga

Muhammadiyah saat ini, saya patut berbangga karena ada banyak orang-orang penting di pemerintahan, orang bertitel dan juga *agniya'*, namun setelah melihat kondisi Muhammadiyah di sini, jika dahulu ada istilah *daerah tertinggal* di tanah Air, maka Muhammadiyah Sulawesi-Tenggara dapat dikategorikan sebagai “Muhammadiyah” tertinggal (Abdullah, wawancara).

Ucapan Amin yang disampaikan dalam nada kelakar dan disambut tawa oleh hadirin, tentu saja membikin merah telinga bagi yang faham kemana arah ucapan itu. Dalam konteks itulah, sangat rasional jika warga dari organisasi ini memandang urgen segera memiliki infrastruktur sebagai pusat menkoordinasikan segala kegiatan (gedung sekretariat). Sadar akan tanggungjawab itulah, maka Abdullah Alhadza menawarkan diri kepada Ketua PWM Sulawesi-Tenggara, Drs. H. Abd. Muin Ghazali untuk ditunjuk sebagai Ketua Panitia Pembangunan Gedung Kantor Muhammadiyah. Usulan tersebut disambut positif, maka dibentuklah Panitia Pembangunan yang terdiri dari 5 (lima) orang yaitu : Ketua : Abdullah Alhadza, Sekretaris: Latara Patra, dan Bendahara Muh Saleh B. serta 2 (dua) orang anggota masing-masing Kamiluddin Kandatjong dan Abdul Mannang (Arsip Muhammadiyah). Sebagai tindak lanjut dari SK tersebut, Ketua Panitia meminta bantuan partisipatif kepada Direktur CV. Jasa Mario Kamruddin Hamid (Konsultan Perencana) untuk mendesain gambar sekaligus menghitung besaran anggarannya (Abdullah, wawancara/Arsip).

Tidaklah mudah untuk membangun sebuah bangunan permanen sebesar kantor Muhammadiyah pada waktu tersebut. Selain karena sumber daya ekonomi Muhammadiyah yang belum mapan, situasi politikpun tidak kondusif bagi eksistensi organisasi dakwah seperti Muhammadiyah. Namun terdorong oleh amanah warga persayarikatan, maka panitia dengan segala keterbatasannya tidak pernah merasa lelah untuk terus berusaha mewujudkan harapan memiliki kantor secara mandiri. Dalam upayanya mewujudkan bangunan tersebut, maka dibentuklah tim penggalangan dana yang bergerak di lingkungan warga Muhammadiyah. Selain itu Abdullah dkk., juga berupaya menjaling relasi dengan sejumlah orang yang bersimpati dengan agenda Muhammadiyah. Kepercayaan masyarakat pada elemen Muhammadiyah, khususnya yang melekat pada beberapa individu aktivis Muhammadiyah, mendorong banyak di antara *agniya* yang berempati untuk menyalurkan *infaqnya* bagi realisasi pembangunan Pusat Kegiatan Muhammadiyah. Usaha dan kerja keras panitia pada waktu itu berhasil

mengumpul dana pembangunan sebesar Rp 44.275.000. Besaran dana yang diperoleh berasal dari 52 orang donator warga dan simpatisan Muhammadiyah (Kamiluddin, wawancara).

Dana yang terkumpul sebagaimana jumlah di atas, oleh panitia dimanfaatkan semaksimal mungkin agar dapat memenuhi harapan mewujudkan kantor sesuai desain perencanaan. Kerja keras panitia yang dipadu dengan keikhlasan untuk berbuat, pada akhirnya membuahkan hasil, sehingga pada tanggal 30 April 1997 M., bertepatan dengan 22 Zulhijjah 1417 H., bangunan yang direncanakan memasuki tahap pengerjaannya. Bangunan tersebut sesuai dengan analisa panitia diletakkan pada bagian Selatan lahan milik persyarikatan di Lorong Jati yang didalamnya telah terdapat bangunan SMA Muhammadiyah. Pilihan tersebut tidak lepas dari rancangan master plan Pemerintah Kota Kendari yang telah mendesain sebuah jalan baru tepat berhadapan dengan lokasi kantor. Oleh Pemerintah Kota jalan tersebut diberi nama Jalan Ld. Hibali untuk akhirnya berganti nama menjadi jalan KH. Ahmad Dahlan. Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah, giat sungguh-sungguh warga persyarikatan untuk memiliki infrastruktur sebagai pusat kegiatan organisasi (kantor) kemudian terealisasi. Dalam masa lebih kurang dua tahun bangunan yang direncanakan berdiri tegak dan diresmikan pada tanggal 17 April 1999 bertepatan dengan 1 Muharram 1419 H. Bangunan tersebut diresmikan dengan menggunakan nama *Gedung Dakwah Muhammadiyah Sulawesi-Tenggara*. Sebagai ungkapan rasa syukur, maka pada tanggal tersebut diatas diselenggarakan seremoni peresmian gedung. Acara tersebut dihadiri tamu yang tidak hanya berasal dari kalangan warga Muhammadiyah, tetapi juga dihadiri oleh sejumlah pejabat tingkat Provinsi dan Kota serta perwakilan tokoh dan ormas dari berbagai unsur. Dari komentar beberapa tokoh yang hadir terekam bahwa fenomena ini menjadi istimewa lantaran untuk ukuran Sulawesi-Tenggara baru dimomen itu ada satu Ormas yang mempunyai kantor dengan Gedung Permanen milik sendiri (Abdullah, wawancara).

Jika merujuk pada rencana awal, pada mulanya luas bangunan gedung Muhammadiyah yang direncanakan adalah seluas 572,5 m², terdiri dari : (a). Bangunan Kantor seluas 10 X 22 m = 220,0 m², dan., (b). Bangunan Aula seluas 15 m X 23,5m = 352,5 m²., dengan estimasi anggaran sebesar = Rp 114.500.000,-.(Arsip Muhammadiyah). Bila dalam faktanya warga persyarikatan hanya menyaksikan bangunan kantor tanpa gedung pertemuan, hal tersebut terjadi karena setelah

pembangunan gedung tersebut, dalam internal Muhammadiyah terjadi lompatan ide yang melampaui gagasan pembangunan Aula yang sebelumnya direncanakan berada dalam satu paket dengan bangunan kantor. Lompatan ide dimaksud adalah niat warga persyarikatan untuk mendirikan Universitas Muhammadiyah Kendari (UMK), kondisi tersebut menjadi salah satu sebab sehingga bangunan Aula urung dilaksanakan, karena pada saat yang sama Ketua Panitia Pembangunan Kantor dalam hal ini Abdullah Alhadza diamanahi tugas sebagai Ketua Badan Pendiri UMK oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah. (Abdullah, wawancara)

Dalam perkembangan selanjutnya Gedung Dakwah Muhammadiyah oleh para aktivis Muda Muhammadiyah disingkat dengan “GDM”. Menurut Abdullah nama tersebut dipilih selain karena terinspirasi oleh nama Gedung Dakwah PP. Muhammadiyah di Menteng Raya Jakarta, juga dimaksudkan supaya dapat digunakan bersama segenap elemen Muhammadiyah. Seiring dengan perjalanan waktu, GDM yang terangkai dari tiga huruf konsonan dan sejatinya merupakan akronim, bernetamorfosis menjadi sebuah “kata” yang berkembang secara spesifik dalam internal lingkungan Muhammadiyah. Kata “GDM” selalu mengiang dan akhirnya menjadi akrab pada pendengaran anak-anak dan warga Muhammadiyah, sehingga GDM adalah Muhammadiyah itu sendiri karena setiap aktivitas persyarikatan, baik yang dilakukan oleh Muhammadiyah maupun ortomnya, pusat kendali kordinasinya bertempat di GDM. Karenanya gedung ini sejak selesai didirikan seutuhnya menjadi epicentrum aktivitas Muhammadiyah, setelah dalam waktu yang cukup lama giat Muhammadiyah digerakkan melalui sekretariat yang berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya untuk tidak mengatakan sekretariat tanpa wujud.

Di GDM inilah serangkaian aktivitas, aksi dan sosial didesain khususnya oleh Angkatan Muda Muhammadiyah. Yang paling akhir adalah gerakan menggugat kematian Randi yang meregang nyawa terkena timah panas pada aksi mahasiswa menolak RUU Anti Korupsi. Gerakan tersebut dimotori oleh kader-kader muda Muhammadiyah yang sekaligus memberikan pendampingan hukum atas keluarga korban untuk menuntut penyelesaian hukum atas kasus tersebut. Dalam gerakan tersebut, GDM menjadi saksi sejarah berkumpulnya sejumlah advokat yang direkomendasikan oleh Majelis Hukum dan HAM Muhammadiyah dalam rangka mengungkap kasus kematian Randi. Setelah beberapa bulan sebelumnya gedung inipun dijadikan sebagai epicentrum

kordinat bagi aksi kemanusiaan yang digalang oleh *Muhammadiyah Dissaster Management Centre* (MDMC) untuk korban bencana di Palu dan banjir di Konawe Utara.

Pendirian gedung sebesar GDM secara prinsip bukanlah hal yang luar biasa untuk konteks Muhammadiyah secara nasional, karena di berbagai wilayah, gedung-gedung kantor Pimpinan Muhammadiyah Wilayah dapat disaksikan tegak menghiasi kota sebagai penanda eksplisit jika di tempat tersebut ruh Muhammadiyah bersemayam. Tetapi yang harus disadari, Muhammadiyah Sulawesi-Tenggara bukanlah Muhammadiyah di pulau Jawa atau di Sulawesi-Selatan yang mapan dari sisi sumber daya manusia dan ekonomi. Oleh karena itu, statement Amin Rais pada tahun 1995 yang menyatakan bahwa Muhammadiyah Sulawesi-Tenggara adalah "*Muhammadiyah Daerah Tertinggal*", adalah upaya Amin untuk melukiskan tentang posisi Muhammadiyah Sulawesi-Tenggara dengan organ yang sama di tempat lain. Pernyataan Amin bukan tanpa data, pandangan tersebut diyakini berdasarkan pengamatannya atas sejumlah fenomena Muhammadiyah di berbagai daerah yang pernah dikunjunginya. Atau paling tidak dapat dikatakan; bahwa tesis Amin benar adanya, bila eksistensi Muhammadiyah di wilayah ini diduduk sandingkan dengan realitas capaian Muhammadiyah di Jawa atau setidaknya dengan Sulawesi-Selatan sebagai tetangga terdekat Sulawesi-Tenggara.

Dari sisi kuantitas amal usaha sebagai indikator paling sederhana untuk mengukur kemajuan Muhammadiyah di suatu wilayah, tampak kasat mata dan niscaya diakui jika Muhammadiyah Sulawesi-Tenggara belum semaju entitas Muhammadiyah di beberapa belahan kota seperti Jawa dan Sumatera. Kendati demikian, kondisi "keterbelakangan" tersebut tidak cocok disematkan untuk positioning Muhammadiyah Sulawesi-Tenggara, jika organ ini diperhadapkan dengan sejumlah organisasi Islam lainnya yang secara administratif beraktivitas di wilayah ini. Salah satu bukti empirik untuk menunjang argumentasi tersebut adalah dengan keberadaan GDM. Hal ini perlu dieksplisitkan, setidaknya untuk membuktikan secara eksternal dan internal tentang realitas dan fakta tentang Muhammadiyah. GDM membuktikan bahwa gerakan parsyarikatan Muhammadiyah tidak sekedar terdaftar dalam data arsip Kantor Kesatuan Bangsa (KESBANG POL) laiknya sejumlah organ non pemerintah kebanyakan yang terdata memiliki nama tetapi wujud dari epicentrum kendali kegiatannya tidak tampak dipermukaan atau paling banter hanya memiliki "papan nama" yang diletakkan di rumah pengurus. GDM bukanlah sekedar papan nama yang dapat dipesan dalam durasi waktu

satu hingga dua pekan. GDM dipesan melalui perencanaan matang dengan niat tegak lurus diatas tujuan untuk membangun umat melalui jalur Muhammadiyah.

GDM menjadi bukti konkrit wujud dari semangat dan karakter sosial warga Muhammadiyah yang sulit dicari duanya pada masa tersebut. Disaat Ormas-ormas Islam, banyak yang terpaksa tunduk pasrah dalam pusaran dinamika situasi politik yang mengarah pada kekuasaan otoriter. Disaat pemegang kuasa pada era tersebut memupuk subur visi kecurigaan atas aktivitas pergerakan dakwah, Muhammadiyah memilih tetap konsisten dan menampik pasrah atas situasi sosial yang dihadapi. Melalui pembangunan GDM, Muhammadiyah membuktikan bahwa meski masa memaksa elemen sosial untuk tertatih bahkan lumpuh layu, tunduk pasrah tanpa daya dengan regulasi yang jauh dari keberpihakan terhadap pembangunan umat, elemen dan fungsionaris Muhammadiyah dapat tetap tegak di tengah arus deras tekanan politik tanpa harus menggadaikan idealisme. Tegak berdiri di atas lahan sendiri, GDM adalah fakta yang menunjukkan bahwa dibalik wajah Muhammadiyah yang sederhana, miskin retorika dan publikasi, entitas persyarikatan ini mampu mengukir bukti dengan membangun ruang sebagai tempat warganya berinteraksi, bersilaturahmi sekaligus sebagai tempat mengasah ketajaman identitas.

Bangunan fisik GDM untuk ukuran masa terkini, bukanlah bangunan mewah untuk tidak mengatakan ketinggalan zaman, terbukti setelah masa tersebut sejumlah gedung Amal Usaha Muhammadiyah dengan luasan lebih besar, dipadu dengan keindahan arsitektur dapat didirikan oleh elemen Muhammadiyah Sulawesi-Tenggara seperti yang dapat disaksikan paling tidak di dua tempat yaitu Universitas Muhammadiyah Kendari (UMK) dan Universitas Muhammadiyah Buton (UMB). Tetapi untuk ukuran masanya, bangunan tersebut patut diberi apresiasi yang tinggi oleh kader-kader Muhammadiyah, khususnya bagi yang sedang bereksistensi dalam ruang sejarah Muhammadiyah. Selain karena masih langkanya gedung yang dimiliki oleh ormas dakwah pada masa tersebut (masa 1990-an), wujud GDM bereksistensi tanpa donasi dari funding luar. GDM menjadi sangat bermakna bagi warga persyarikatan, khususnya bagi mereka yang aktif dipersyarikatan antara tahun 1997-an hingga 2017, bukan saja karena tempat ini sebagai ruang pengkaderan dan konko-konko anak-anak Muhammadiyah, tetapi juga karena gedung ini dibangun diatas peluh kader-kadernya yang mengumpulkan dana serupiah demi serupiah untuk kemudian disusun sebagai fondasi, slop, rangka besi, dinding bata, dan

atap sehingga terwujud menjadi sebuah bangunan permanen. Selain hal yang disebutkan di atas, gedung ini pada realitasnya adalah ruang dimana generasi Muhammadiyah belajar membangun gagasan strategis, dan hasilnya terlihat nyata bahwa dari gedung ini tercetus sebuah gagasan yang sarat dengan nilai historis, karena dari gedung inilah dilahirkan sebuah instrument baru bagi dakwah Muhammadiyah di Sulawesi-Tenggara, yang saat ini dirasakan manfaatnya bagi banyak orang instrumen itu bernama *Universitas Muhammadiyah Kendari* (ibid).

Apapun bentuknya, dan bagaimanapun prosesnya, dalam kenyataannya GDM dibangun dengan semangat filantropi, suatu visi yang urgen untuk terus dan secara berkelanjutan disuburkan di lingkungan Muhammadiyah. Ini perlu ditekankan, mengingat hantaran gelombang budaya individual materialistis kini dan akan terus menyasar warga dunia secara massif. Bila tidak diatasi melalui terapi yang tepat, budaya ini pada gilirannya berpotensi mempengaruhi warga persyarikatan dan pada saatnya akan mengikis tradisi sosial filantropi yang menjadi kultur identitas komunitas Muhammadiyah. Dalam waktu lebih kurang 20 tahun, GDM berdiri mewartakan dan mengukuhkan eksistensi Muhammadiyah di Sulawesi-Tenggara. Dalam masa 2 (dua) daswarsa tersebut GDM menjadi “markaz”, tidak saja bagi Muhammadiyah tetapi juga bagi organisasi otonom Muhammadiyah tingkat wilayah, IPM, IMM, Pemuda, NA dan Tapak Suci, semua menyatu berada dalam satu atap. Seiring dengan itu, GDM yang berada dalam satu lokasi dengan UMK yang memiliki ribuan mahasiswa tidak lagi kondusif sebagai tempat berkantor, menata administrasi dan berbagai kegiatan organisasi lainnya, karena suasananya semakin riuh dengan lalu lalang mahasiswa di sekitarnya. Pada saat yang sama usia gedung yang sudah terlihat “rentah” dan cenderung kumuh menjadi tidak lagi “bergengsi” untuk dijadikan penanda identitas organ sebesar Muhammadiyah. Selain aspek arsitektural yang cenderung telah membelakangi zaman, kapasitas gedung juga tampaknya tidak lagi memadai untuk menampung aktivitas organisasi yang semakin padat. GDM yang pada zamannya tampak kokoh dan “megah” perlahan tetapi pasti tidak dapat lagi menampung aspirasi sistem sosial budaya yang dihantar oleh gelombang modernisme abad 21.

Sadar akan realitas tersebut, maka dalam Musyawarah Wilayah Muhammadiyah ke VI relokasi Kantor PWM menjadi salah satu agenda kerja Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Periode 2010-2015. Karena itulah pada 3 (tiga) tahun pasca MUSYWIL

tepatnya Jumat 15 November 2013, rapat dengan agenda pembangunan Kantor Wilayah diselenggarakan. Dalam rapat tersebut, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah berencana membangun sejarah yang lebih *adabtable* dengan zaman terkini, yang realisasinya niscaya merelokasi GDM pada satu tempat yang lebih luas dan tidak lagi menyatu dengan UMK. Alas dasar pemikirannya adalah, bahwa Muhammadiyah dalam usianya yang sudah semakin “dewasa” untuk ukuran manusia, penting segera memperlebar luasan wilayah pengaruhnya. Selain itu, UMK dari hari ke hari menunjukkan peningkatan jumlah mahasiswa yang signifikan, butuh untuk memperluas kampus dan sarana perkuliahan karena daya tampungnya sudah tidak lagi memadai. Dan karena itulah konsep relokasi semakin mendesak, sehingga jalan keluarnya adalah lahan tempat GDM berdiri seluruhnya akan dijadikan sebagai kampus, dan sebagai “kompesasi” UMK niscaya membangun kantor Muhammadiyah yang baru (Mustam, wawancara/Arsip)

Relokasi Kantor Muhammadiyah Wilayah sebagai ganti dari GDM rencananya akan dibangun pada lahan seluas setengah hektar di Kelurahan Mokoau yang merupakan tanah wakaf Hj. Andi Intang. Dalam rapat tersebut sempat terjadi pro dan kontra, alasan klasiknya karena GDM adalah asset sejarah Muhammadiyah, namun salah seorang fungsionaris Pimpinan Wilayah dalam hal ini dr Hamzah, mengatakan bahwa: *kiranya tidak terlalu keliru jika Muhammadiyah merobohkan asset sejarahnya untuk menorehkan sejarah yang lebih gemilang di masa datang* (ibid). Pandangan Hamzah yang filosofis tersebut tidak saja menyatukan kesepakatan tetapi juga menguatkan niat Pimpinan Wilayah Muhammadiyah untuk merelakan bangunan bersejarah tersebut untuk diganti dengan bangunan yang lebih representative. Dalam masa kurang lebih tiga tahun setelah alih fungsinya, bangunan GDM tetap utuh namun fungsinya sebagai epicentrum dakwah dan kantor Muhammadiyah telah hilang. Pada Rabu tanggal 11 Maret 2020, gedung yang genap berusia 21 (duapuluh satu) tahun dan sangat bersejarah dalam perjalanan Muhammadiyah di Sulawesi-Tenggara diserahkan sepenuhnya kepada UMK. Perlu dicatat alih fungsi GDM tidak berdampak kepada Muhammadiyah karena pada saat yang sama elemen Muhammadiyah membebaskan sebuah RUKO yang difungsikan sebagai kantor sementara.

Pembahasan

a). Membangun dalam Ruang Struktur Politik Tertutup

Bangunan gedung kantor Muhammadiyah seluas 220 m²., untuk ukuran zaman sekarang tentu saja tidaklah istimewa, namun jika diukur dengan zaman ketika tempat atau gedung tersebut dibangun tentu saja menjadi “sangat” luar biasa. Betapa tidak, selain yang dimiliki Muhammadiyah, gedung yang diorientasikan sebagai pusat kegiatan sosial dan pengkaderan yang didirikan oleh lembaga non pemerintah pada saat itu hanya dimiliki oleh organisasi politik sekaliber GOLKAR. Namun GOLKAR berbeda sama sekali dengan Muhammadiyah, GOLKAR sebagai partai politik berkuasa dibawah kendali Soeharto memiliki segalanya, dengan satu kata atau secarik *kata belece* gedung sebesar apapun dapat dibangunnya. Sebaliknya yang terjadi dengan Muhammadiyah, sebagai ormas gerakan Islam yang pada masa paruh awal hingga menjelang kejatuhan Soeharto, adalah gerakan sosial yang senangtiasa diawasi, dicurigai gerakannya bahkan dihalang-halangi kegiatannya. Perjalanan sejarah negeri ini mengakui secara jujur, bahwa pada masa ORBA langkah Ormas semacam Muhammadiyah mengalami kesulitan untuk melangkah plus mengembangkan aktivitasnya di ranah publik, apatalagi membangun sebuah “monument” yang merupakan media tumbuh dari generasi muda yang dibekali cara berpikir kritis berlandaskan nilai-nilai Islam, tentu akan sangat diwaspadai oleh pemangku kuasa politik pada waktu itu (Ahmad Aljufri, wawancara).

Karenanya jika ada organ sosial kemasyarakatan apalagi yang haluan gerakannya bertujuan menggelorakan nilai-nilai Islam di tengah masyarakat mampu bernegosiasi untuk tidak mengatakan beroposisi dengan situasi pada masa itu sehingga mendirikan bangunan yang diorientasikan untuk membina kader-kader dakwah, tentu saja menjadi sangat luar biasa. Berbeda dengan GOLKAR yang merupakan mitra sejati penguasa ORDE BARU, Muhammadiyah sekalipun tidak anti terhadap pemerintah ORDE BARU, namun gerakan dan sejumlah kader penggerakannya menjadi langganan introgasi pihak keamanan pada waktu itu, sehingga untuk mewujudkan gedung pusat kegiatan Islam menjadi terasa sangat sulit. Selain faktor aspek politik yang kurang kondusif, gedung Muhammadiyah juga berbeda dengan gedung GOLKAR yang akan menjadi sangat mudah dibangun dengan dana bantuan pemerintah. Membangun gedung yang dicita-citakan menampung aktivitas organisasi yang bersifat *non profit oriented* seperti yang dilakukan Muhammadiyah tampaknya kurang dilirik sehingga untuk masa tersebut mestinya sangat sulit. Namun dalam kenyataannya Muhammadiyah dengan berbagai

keterbatasan yang dimiliki dapat merealisasikan asa warganya memiliki sebuah gedung sebagai tempat mereka mengekspresikan gagasan dan ide-ide kreatifnya.

Ditinjau dari luasan serta desain arsitekturnya, GDM secara prinsip sangat sederhana, namun bagi Muhammadiyah tempat ini memiliki nilai yang sangat strategis. Mengingat melalui wujud gedung ini, Muhammadiyah semakin nyata dalam ruang publik Sulawesi-Tenggara. Penyematan kata “Gedung” pada lokasi sekretariat Muhammadiyah ini, memberi kesan jika tempat ini adalah bangunan yang berfisik besar. Gedung yang tampak sederhana itu menjadi “besar” dengan disematkannya kata “Muhammadiyah” di belakangnya, hal ini terkait erat dengan psikologi masyarakat Indonesia, yang mengasosiasikan kata “Muhammadiyah” sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia. Pada saat yang sama Muhammadiyah di Sulawesi-Tenggara menjadi lebih besar minimal dalam semangatnya ketika atau sejak gedung ini mewujudkan sebagai sekretariat. Kendatipun fisik GDM tidak terlalu besar dan tampak tidak artistik untuk ukuran terkini, namun untuk takaran zamannya, GDM menjadi tampak sangat “mewah”, bila indikasinya diletakkan pada timbangan atau ukuran kemampuan berbuat organisasi massa Islam pada era akhir 90-an. Masa yang ditinjau dari sisi perspektif sejarah politik Indonesia merupakan era tertutup politik, sehingga untuk membangun gedung sekelas GDM oleh sebuah organisasi massa yang sumber pendanaannya dari donasi dan kantong para anggotanya, butuh energi berlipat ganda. Sejarah bangunan sekretariat Ormas di Sulawesi-Tenggara agak kesulitan untuk menemukan bukti tentang adanya bangunan sekretariat yang tegak di lokasi strategis tanpa adanya campur tangan bantuan elemen pemerintah dan atau pengusaha besar. Bahkan hingga kinipun, banyak organ sosial yang haluan kerja dan gerak nafasnya berada pada jalan yang sama dengan Muhammadiyah, umumnya belum memiliki kantor di lokasi yang strategis seperti yang dimiliki oleh Muhammadiyah.

Sisi keluarbiasaan dari gedung ini, karena fungsi gedung tersebut selain tempat konsolidasi gerakan dakwah juga adalah sarana atau media untuk mendidik kader-kader muda Muhammadiyah yang karena situasi zaman pada waktu itu, banyak yang menjadi “militan” untuk tidak mengatakan beroposisi dengan pandangan politik penguasa. Dengan tujuan dan fungsi pemanfaatan gedung sebagaimana yang disebutkan, maka hal yang hampir pasti terjadi adalah Muhammadiyah sebagai organisasi sosial dan dakwah akan berpotensi menjadi subyek yang dicurigai oleh pemangku kuasa ORDE BARU.

Jalan yang ditempuh Muhammadiyah sebagaimana yang disebutkan tidaklah menguntungkan secara politis untuk dilakoni dalam situasi struktur ruang politik yang tertutup seperti pada masa ORDE BARU. Karena itulah dalam realitasnya organ-organ berorientasi sosial dan dakwah pada waktu itu jarang untuk tidak mengatakan tidak ada yang dapat membangun sarana yang bertujuan untuk melakukan pembinaan generasi dakwah, kecuali yang benar-benar berada dalam kendali atau berafiliasi dengan pemerintah. Jika dalam kenyataannya Muhammadiyah dapat mewujudkan bangunan tersebut, itu tidak berarti kalau Muhammadiyah pasrah untuk berada dalam arus politik mainstream yang diciptakan ORDE BARU. Kemampuan Muhammadiyah selain karena didorong oleh militansi warga Muhammadiyah dalam menggerakkan *dakwah amar makruf nahi mungkar*, juga banyak ditentukan oleh etos filantropi warga Muhammadiyah yang terbangun melalui jalur pengkaderan dan dakwah yang disuarakan oleh Muhammadiyah. Sebagaimana temuan Arfandi, bahwa etos filantropi Muhammadiyah menjadi kekuatan penyeimbang dan penopang ketika negara dengan sengaja mengabaikan kewajibannya menyediakan layanan kesejahteraan pada masyarakat. Lebih lanjut Arfandi menyatakan; komitmen Muhammadiyah dalam mendorong kesejahteraan tidak kontraproduktif dengan tujuan lahirnya negara maupun *welfare state*. Peran ini sama sekali berbeda dengan konsepsi yang diterapkan oleh beberapa kelompok islamis, baik di dalam maupun di luar negeri yang berkecenderungan memanfaatkan gerakan filantropi untuk menggerogoti legitimasi negara. (Arfandi, h.152)

Fenomena pembatasan kesempatan berekspresi dalam ruang politik tertutup sebagaimana yang diterapkan oleh pemerintah ORDE BARU yang secara teori harusnya berfungsi efektif menghambat laju pertumbuhan gerakan sosial dalam kenyataannya tidak selalu efektif. Fakta empirik yang ditunjukkan dengan tegaknya GDM sebagai monumen yang dibangun oleh komunitas Muhammadiyah di tengah situasi politik yang bias atas segala gerakan dakwah Islam, membuktikan bahwa ruang politik yang didesain untuk menghambat bahkan menghegemoni tidak cukup kuat berhadapan dengan etos filantropis sosial yang berdiri tegak pada landasan keikhlasan.

b). Resource Mobilization dalam Membangun Monumen

Satu hal yang dimaklumi bersama sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Muhammadiyah sebagaimana organisasi dakwah Islam lainnya berhadapan

dengan fakta sistem sosial politik. Selain itu Muhammadiyah Sulawesi-Tenggara pada tahun 1990-an juga diperhadapkan pada kenyataan lemahnya sumber daya ekonomi. Tidak adanya kantong-kantong sumber pendanaan menjadikan banyak organisasi sosial hanya dapat eksis ketika Musyawarah pergantian pengurus. Ketidakjelasan sumber pendanaan menjadikan banyak organ sosial terpaksa terkubur dan selanjutnya menjadi fosil sejarah. Realitas mangkraknya sebagian organ sosial karena fundamental pendanaannya minim atau tidak ada, menjadi fenomena yang tak terhindarkan, sehingga istilah organisasi “papan nama” menjadi idiom baku untuk menyebut entitas sosial yang terpaksa membakukan kebekuannya karena ketiadaan bahan baku untuk bergerak. Fenomena kebekuan organisasi sosial dan dakwah karena ketiadaan bahan bakar penggerak bukanlah cerita tanpa fakta. Dalam realitasnya sejumlah organisasi yang memiliki nama besar di negeri ini terpaksa harus merayap dengan susah payah untuk bisa beraktivitas. Bahkan tidak sedikit di antaranya yang hanya eksis ketika stempel organnya dibutuhkan untuk mensosialisasikan dan atau melegitimasi program dan kebijakan pemerintah. Utamanya bila terjadi gesekan-gesekan sosial di tengah masyarakat namun setelah itu tidak lagi terdengar, dan biasanya kembali eksis ketika cap organnya dibutuhkan oleh pemangku kebijakan.

Salah satu indikator yang dengan mudah dapat menunjukkan bahwa sebuah organ berdaya dalam ruang sosial, ditandai dengan bangunan kantor yang berpadu dengan sejumlah kesibukan yang mewarnai kantor tersebut. Indikasi ini tampak kasat mata terlihat dalam potret Muhammadiyah. Sebagaimana disebutkan GDM sebagai kantor dan pusat aktivitas dakwah adalah penanda eksplisit, jika organ yang telah menapaki usia lebih satu abad ini bereksistensi secara nyata di Sulawesi-Tenggara. Kemampuan Muhammadiyah bergerak dan membangun dalam ruang sosial politik dan budaya yang bias terhadap keberadaan organisasi dakwah, menjelaskan bahwa betapa subyek penggerak organ ini memiliki kemampuan mengelola sumber daya (*resource mobilization*) yang dimiliki dengan baik. Secara konseptual sumber daya memiliki cakupan makna yang luas; meliputi kekuatan finansial, akses terhadap media, dukungan dari anggota dan simpatisan, demikian pula loyalitas kelompok. Sumberdaya juga dapat ditilik dari kepemilikan gedung, penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan, demikian pula dengan nilai ideologi yang dimiliki oleh actor (Opp, 2009, h.139). Dengan demikian, sumber daya adalah segala sesuatu yang memiliki cakupan nilai manfaat yang dimiliki orang perorang

ataupun kelompok sosial yang dapat dikontrol dan dikuasai serta dimanfaatkan secara kolektif untuk tujuan dari visi dan misi organisasi (ibid).

Seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa dana atau modal financial adalah salah satu motor gerak yang sangat menentukan laju gerakan dari setiap organ sosial. Hampir dapat dipastikan ketiadaan modal akan menjadi salah satu hambatan primer dalam menggerakkan roda gigi sebuah organisasi. Sebagaimana organisasi lainnya, Muhammadiyah-pun butuh dana untuk dapat melaju mengikuti irama zaman. Pertanyaan kemudian apakah gerakan Muhammadiyah yang mendirikan kantor dan Gedung Dakwah terwujud dengan sebab sokongan dana dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah atau funding lainnya yang berasal dari dalam dan luar negeri. Jika jawabannya tidak, maka pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana warga Muhammadiyah mewujudkan GDM sebagai penanda identitas tersebut. Jawabnya adalah kemampuan elemen Muhammadiyah memobilisasi sumber daya yang ada. Fakta tentang kepiawaian komunitas Muhammadiyah memobilisasi sumber daya yang dimiliki berjalan berkelindang dengan realitas jumlah Amal Usaha Muhammadiyah yang terbilang banyak di daerah ini bila dibanding dengan ormas-ormas lainnya. Dalam satu sesi pertemuan Muhammadiyah berdurasi dua jam yang diselenggarakan di Hotel Same pada tahun 2016, warga persyarikatan dapat mengumpul dana sebesar Rp. 450.000.000. (Syukur, wawancara). Fenomena ini untuk konteks organ sosial Islam di Sulawesi-Tenggara sulit ditemukan pembandingnya. Gejala yang tampak 2016 di Same Hotel sesungguhnya adalah tayang ulang etos filantropi Muhammadiyah yang ditunjukkan 20 tahun silam ketika awal mula warga Muhammadiyah mencanangkan pembangunan kantor yang kemudian disebut GDM (Arsip Muhammadiyah).

Potret urunan dana untuk membangun Amal Usaha Muhammadiyah telah menjadi tradisi yang mengakar dalam Muhammadiyah. Berbagai Amal Usaha Muhammadiyah seperti Masjid, Sekolah, Perguruan Tinggi, Panti Asuhan, Rumah Sakit, dll., lazimnya bertumpu pada sokongan dana para warga Muhammadiyah yang dalam konteks Muhammadiyah Sultra tahun 90-an belum mewujud sebagai organ yang mengakar dan populasinyapun sangat minim. Berhadapan dengan fakta ruang struktur sosial politik yang tertutup, organ yang belum mengakar serta jumlah anggota yang minim, kiranya mustahil bagi Muhammadiyah saat itu untuk membangun kantor dan gedung dakwah. Jika dalam faktanya hal tersebut mewujud dalam sejarah Muhammadiyah, hal tersebut

membuktikan bahwa elemen Muhammadiyah dapat memaksimalkan fungsi sumber daya yang dimiliki atau dengan kata lain elemen Muhammadiyah dapat memaksimalkan dana yang sedikit untuk memberi hasil yang lebih besar dari kapasitas potensi dana yang dimiliki. Di Muhammadiyah lahir semacam hukum bahwa jika warga persyarikatan diberi kepercayaan dengan modal untuk membangun satu unit gedung, maka modal tersebut dapat disulap atau dimaksimalkan menjadi dua gedung. (Abdullah, wawancara).

Paradigma di atas merupakan petuah yang selalu disuarakan oleh para tokoh Muhammadiyah sehingga kemudian menjadi nilai yang melekat dalam cara berpikir dan bertindak komunitas Muhammadiyah. Petuah sebagaimana yang disebutkan di atas selain sebagai spirit, gambaran keikhlasan dan kejujuran dalam mengembangkannya amanat, sekaligus sebagai kreativitas produktif elemen Muhammadiyah dalam melipatgandakan nilai yang melekat pada sumber daya yang dimiliki. Kesadaran memanfaatkan sumber daya menjadi energi yang berlipat ganda juga dipicu oleh jargon *fastabiqul khairat*. Jargon yang mentradisi sebagai penutup kalimat panjang dalam setiap kegiatan di lingkungan anak-anak Muhammadiyah tersebut, memicu daya adrenalin untuk selalu bergerak membangun monumen kebaikan bagi masyarakat. Gugus nilai itulah yang membentuk etos filantropi Muhammadiyah sehingga dalam suasana kekurangan sekalipun elemen organ ini selalu ingin maju seiring dan beriringan dengan zaman.

Modal sumber daya dalam bentuk “nilai” sebagaimana yang disebutkan di atas menjadikan gerak Muhammadiyah semakin terpicu ketika tantangan menghadang. Realitas ini seolah menjadikan Muhammadiyah tampak “imun” dengan tantangan. Karenanya ketika suasana politik menggeliat ke arah kutub negatif sekalipun, elemen Muhammadiyah tidak pernah berhenti membangun tanpa harus menjajakan idealisme. GDM adalah bukti menyejarah bahwa betapa ruang politik yang kedap kritik sebagaimana yang dibangun oleh ORDE BARU, Muhammadiyah dibawa sinaran nilai-nilai yang dibangunnya tetap melangkah, sesekali atau bahkan berkali-kali tertatih, tetapi yang jelas tetap melangkah bahkan terus membangun sebagai pembuktian bahwa eksistensinya tidak pernah absen dalam arena kompetisi kebaikan sebagaimana jargon yang selalu didengunkannya *fastabiqul khairat*.

Semua itu terwujud boleh jadi karena penggiat Muhammadiyah umumnya berasal dari kalangan menengah terdidik perkotaan, umumnya berprofesi sebagai Aparat Sipil Negara dan selebihnya berwiraswasta. Dengan latar belakang potensi dan profesi yang

disebutkan, maka tidak keliru untuk menyatakan bahwa sekalipun minoritas dalam jumlah, namun elemen Muhammadiyah bisa bertahan, lebih dari itu mereka tetap eksis melintas zaman, geografis dan budaya. Kemampuan elemen Muhammadiyah melintasi lorong waktu sambil memelihara daya “imun” dari intervensi kuasa luar dapat dimungkinkan, karena dalam banyak hal, laku sumber daya Muhammadiyah dalam bertindak memadukan daya ideologi yang diyakininya dengan logika. Kekukuhan ideologi yang berpadu dengan ketajaman logika mendorong mereka untuk berani ber-*fastabiqul khairat*, itulah yang terlihat dalam langkah Muhammadiyah di tahun 90-an ketika membangun Gedung Dakwah sebagai monument guna mengeksplisitkan kegiatan dakwah kepada pemangku kebijakan yang selalu memelihara dan membangun kecurigaan atas subyek dakwah.

Lebih dari sekedar infrastruktur fisik, GDM menggambarkan tentang daya sosial yang tumbuh kuat mengakar pada lingkungan Muhammadiyah. Selain hal tersebut, wujud GDM membuktikan jika Muhammadiyah mampu memobilisasi sumber dayanya dengan baik. Karena sangat sulit untuk dipahami jika organ yang sesungguhnya tidak memiliki sumber pembiayaan dapat membangun kantor dan gedung sebagai pusat aktivitas dakwah sebagaimana GDM. Dalam konteks inilah logika dan nalar sehat memberi jawaban atas tanda tanya tersebut, bahwa wujud GDM adalah buah hasil dari etos filantropi warga Muhammadiyah yang berhasil dikelola secara elegan.

c). Social Framing: Membingkai Narasi Pembangunan dalam Bahasa Elegan

Keberadaan GDM sebagai kontribusi positif fungsionaris Muhammadiyah selain disebabkan karena kemampuan pimpinan mengelola daya filantropi warga dan simpatisan Muhammadiyah, juga tidak dapat dilepaskan dari kemampuan elemen Muhammadiyah dalam mengemas gagasannya. Ibarat produk, gagasan membangun GDM ditawarkan dan disosialisasikan kepada warga persyarikatan. Proses menawarkan dan mensosialisasikan gagasan sebagaimana yang disebutkan dalam teori gerakan sosial disebut “framing” yaitu suatu hal yang merujuk pada fenomena aktif dan berproses dengan melibatkan agen dalam menkonstruksi realitas. Dalam pandangan Goffman *framing* adalah skema dari intepretasi yang memungkinkan bagi seseorang dapat memetakan, mengetahui (memahami), mengidentifikasi serta memberi penanda atas setiap kejadian atau peristiwa yang muncul dalam ranah kehidupan dan dunia secara

umum (Benfoord, h.286/Snow,2004,h.9). *Framing* dimunculkan oleh pengolah gerakan agar gagasan yang menjadi visi misi sebuah gerakan mendapat simpati dan dukungan. Melalui *framing*, sebuah gerakan melabeli pengalaman-pengalaman yang akan dijadikan sebuah *guideline* dalam bertindak (ibid).

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa pembangunan GDM selain dipicu oleh sindiran Amin Rais yang mengidentikkan Muhammadiyah Sulawesi-Tenggara sebagai “Muhammadiyah daerah tertinggal”, juga didasari atas suatu kenyataan bahwa sejak organ ini eksis di Bumi Anoa tidak diketahui dengan jelas letak kantor atau sekretariat yang dapat dirujuk sebagai penanda eksistensinya. Dalam waktu yang cukup lama, rumah Ketua terpilih secara otomatis dijadikan sebagai kantor, tempat rapat, dan menjamu tamu organisasi. Sadar realitas tersebut, maka pimpinan menginisiasi pembangunan GDM, yang nantinya berfungsi sebagai kantor serta pusat kendali aktivitas organisasi sekaligus sebagai sarana atau tempat kaderisasi (Abdullah,wawancara). Ada beberapa pesan sederhana yang termuat dari pernyataan di atas yaitu: (1). Muhammadiyah di wilayah ini ingin berdiri sejajar dengan Muhammadiyah di tempat lainnya. Untuk itu hal pertama yang harus dipenuhi adalah memperjelas penanda eksistensinya yaitu membangun kantor/GDM. (2). Kehadiran GDM akan membuktikan bahwa organ ini bukanlah sekedar organ “papan nama”, karenanya GDM sekaligus menunjukkan secara jelas jati diri Muhammadiyah. (3). GDM sebagai titik kordinat pusat kendali aktivitas Muhammadiyah Sulawesi-Tenggara, dan .(4). GDM akan menjadi sarana atau tempat mendidik kader-kader muda Muhammadiyah.

Secara umum konteks yang ingin dibangun oleh latar pemikiran tersebut adalah dalam rangka memberikan pemahaman mengenai situasi dan kondisi yang dihadapi Muhammadiyah pada masa tersebut. Kondisi yang sifatnya problematik tersebut pada dasarnya bersifat empirik dalam arti dirasakan langsung oleh para anggota persyarikatan, karenanya membutuhkan solusi sebagai jawaban sekaligus perubahan. Pada tahap ini terlihat jelas upaya ekosponen Muhammadiyah untuk mengartikulasikan masalah dan penanggungjawab. Dalam fase ini aktor-aktor gerakan sosial mencoba mendefinisikan permasalahan-pemmasalahan apa saja yang menjadi isu utama yang dapat memicu empati warganya untuk berpartisipasi melakukan perubahan. Permasalahan tidak adanya kantor, selain berimplikasi pada lambatnya gerak organisasi, juga mengesankan jika organ ini tidak ada bedanya dengan organ sosial kebanyakan yang wujudnya menjadi tidak jelas

karena ketiadaan penanda identitas. Keseluruhan hal yang disebutkan menuntut tanggungjawab semua elemen organisasi. Kondisi inilah yang berhasil membangun semangat orang-orang Muhammadiyah untuk lebih giat berbuat dalam rangka mewujudkan tempat milik sendiri sebagai epicentrum segala aktivitas organisasi.

Kondisi ketiadaan infrastruktur fisik organisasi yang berimplikasi pada laju gerak persyarikatan sebagaimana yang digambarkan, oleh warga Muhammadiyah tidak dikekalkan dalam kenyataan. Demikian pula dengan niat untuk menunjukkan jati diri organisasi melalui pembangunan kantor dan gedung pertemuan tidak dibekukan dalam angan-angan. Bagi komunitas Muhammadiyah, berselancar membangun wacana tidak lebih sebagai tahapan untuk menegosiasikan rencana. Ini penting karena tanpa mensosialisasikan rencana tersebut kepada anggota akan sulit bagi organ sosial seperti Muhammadiyah untuk dapat membangun. Mengingat umumnya organ berbasis sosial tidak memiliki sumber-sumber pendanaan khusus, sehingga lazimnya mereka mengharapkan donasi dari warga atau anggota organisasi ketika akan melakukan sesuatu. Dalam teori *framing* tahapan menegosiasikan rencana dalam ruang publik disebut dengan *diagnose*.

Wacana yang dibangun dalam ruang sosial berfungsi untuk menumbuhkan gairah, untuk selanjutnya melahirkan aksi ril dalam alam realitas sebagai solusi dari peta masalah yang dibentangkan. Garis solusi yang ditempuh sangatlah sederhana yaitu keniscayaan membangun infrastruktur fisik dalam bentuk kantor dan gedung pertemuan. Dengan *prognostic* yang dikemukakan sebagai jalan keluar, diasumsikan berfungsi efektif untuk membangkitkan energi berinfak komunitas Muhammadiyah dan simpatisannya secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, tampak jelas upaya kreatif dan sungguh-sungguh aktor (pengurus Muhammadiyah) untuk membangkitkan motivasi warganya dan pihak luar guna mewujudkan cita-cita membangun kantor dan gedung pertemuan atau merealisasikan garis solusi yang menjadi target. Tampak jelas adanya pengkondisian, yaitu menerjemahkan ide pembangunan kantor Muhammadiyah/ GDM dikemas kedalam kalimat yang sarat makna dan penuh motivasi (*vocabularies of motive*). Yaitu untuk memperjelas eksistensi organisasi dan sebagai pusat kordinasi gerakan dakwah dalam bingkai *fastabiqul khairat*. Kalimat-kalimat tersebut terus ditransmisikan guna memantik empati anggota pergerakan untuk bersatu dalam program yang direncanakan.

Penutup

Merujuk pada data serta analisis yang dilakukan diperoleh kesimpulan sebagai berikut: (1). Dorongan kuat berkompetisi dalam bingkai *fastabiqul khairat* dengan berbagai wilayah Muhammadiyah di daerah lain, menjadi sumber motivasi warga persyarikatan di wilayah ini, untuk bahu membahu dalam mewujudkan infrastruktur yang berfungsi untuk mendesain dan menggerakkan roda aktifitas organisasi secara lebih terkordinasi. Lebih dari sekedar kantor dan gedung pertemuan, GDM adalah penanda identitas dan eksistensial bahwa Muhammadiyah tidak pernah berhenti, tetapi terus bergerak maju kendati berada dalam ruang struktur kesempatan politik yang tertutup, inilah yang menjadi pembeda antar Muhammadiyah dengan organisasi lainnya. Selain yang disebutkan, wujud GDM adalah fakta yang menunjukkan karakter kerja keras, persatuan dan kekuatan berderma dari elemen Muhammadiyah. (2). Upaya mewujudkan GDM dilakukan dengan beragam strategis di antaranya dengan memanfaatkan modal sumber daya yang dimiliki secara efektif. Bahwa dalam kenyataannya Muhammadiyah tidak memiliki fundamental ekonomi sebagai sumber pembiayaan, tidak kemudian menjadikan organ ini kehilangan semangat untuk membangun. Daya filantropi yang kukuh terhujam dalam cara berfikir dan bertindak elemen Muhammadiyah dimanfaatkan secara elegan oleh aktor dengan menyuntikkan narasi-narasi positif (*framing*) yang pada gilirannya memicu menguatnya semangat berderma elemen Muhammadiyah, sehingga dalam waktu kurang dari dua tahun infrastruktur penanda identitas persyarikatan terbukti menghiasi ruang Kota Kendari. (3). Bila dalam kenyataannya Muhammadiyah sebagaimana organ sosial kebanyakan pada waktu itu tidak atau belum memiliki sumber pendanaan memadai untuk mewujudkan ruang khusus yang representatif sebagai tempat berinteraksi dan mengasah ketajaman fikir. Namun hal tersebut bukanlah hambatan signifikan bagi Muhammadiyah untuk merealisasikan asa warga persyarikatan memiliki pusat aktifitas sebagai wadah melakukan olah pikir untuk menciptakan keadaban sosial. Sebab Muhammadiyah sejak mula keberadaannya diperuntukkan oleh mereka yang memiliki etos filantropi, dalam konteks itulah dapat disimpulkan bahwa kehadiran infrastruktur GDM terkait erat dengan semangat atos filantropi warga Muhammadiyah.

Kesimpulan penelitian ini sama sekali tidak bermaksud untuk membingkai etos filantropi dalam ruang dan batasan atau lokus dan tempus Muhammadiyah Sulawesi-Tenggara sebagai salah satu ormas atau gerakan sosial keagamaan di wilayah ini.

Terutama bila mengingat bahwa etos filantropi adalah semangat yang merealita pada setiap kultur ormas keagamaan, sehingga dengan demikian pada gilirannya penelitian ini dapat dikembangkan dengan membandingkan antara etos filantropi yang tumbuh dan berkembang di lingkungan Muhammadiyah dengan etos yang sama pada organisasi berbeda. Atau bahkan dalam konteks lokus dan tempus Muhammadiyah, penelitian ini dapat dikembangkan dengan melihat sustainabilitas dari etos filantropi Muhammadiyah, khususnya ketika ruang struktur sosial politik sudah semakin terbuka seperti sekarang atau dengan menggunakan perspektif yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Ammar, Faozan, (2017), "Implementasi Filantropi Islam di Indonesia, Jurnal Ekonomi Islam dan Filantropi", Vol.1 No.1,
- Arfandi, Hafidz, (2016), "Motif dan Strategi Gerakan Filantropi Muhammadiyah", Jurnal Muhammadiyah Studies, Vol, 1, No. 1,
- Bappenas, "Peran Gerakan Filantropi untuk Keberlanjutan Organisasi Masyarakat Sipil", Laporan Akhir Kajian, (Desember, 2010), Bab III. Tersedia di, [http://ditpolkom.bappenas.go.id/diakses 20 Des. 2018](http://ditpolkom.bappenas.go.id/diakses%20Des.2018)
- Benford, Robert, (2000), "Framing Process and Social Movement: An Overview and Assessment" dalam *Annual Review of Sociology*,
- Depdikbud, (1979), *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Sulawesi-Tenggara*, Jakarta: Depdikbud,
- Fauziah, Amelia, (2016) *Filantropi Islam ; Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia*, Yogyakarta: Gading Publishing,
- Kriesi, Hanspeter, (2004), "Political Context and Opportunity, dalam *Blackwell Companion to Social Movement*, Massachusetts : Blackwell Publishing 2004
- Latief, Hilman dkk, (2015), *Prilaku dan Potensi Filantropi Warga Muhammadiyah (Survey di 11 Kota Besar Indonesia, Yogyakarta: Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengembangan Pendidikan UMY,*
- _____, (2017), *Melayani Umat: Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2017
- Miles, Matthew B. & Huberman, (1986), *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*, Beverly Hills: Sage Publication, 1986
- Nashir, Haedar, (2018) "Muhammadiyah Melangkah Kedepan", dalam *Suara Muhammadiyah*, 07 November,
- Nasution, Hasyimsyah, dkk., (2019), "Pemberdayaan Filantropi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Warga Muhammadiyah di Indonesia", MIQOT, Vol. 43 (2).

- Opp, Karl Dieter, (2009), *Theory of Political Protest and Social Movement: a Multidisciplinary Introduction, Critique and Synthesis*, London: Routhledge, 2009
- Tilly, Charless, (1978), *From Mobilization to Revolution*. London: Edison Publishing,
- Snow, David, (2004) "Framing Process, Ideology and Discursive Fields dalam Blackwell Companion to Social Movement, Massachusetts : Blackwell Publishing
- Tohari Hajrianto W., (2015) "Lazisme: Filantropi Tulang Punggung Gerakan Islam", dalam *Republika*, 7 Agustus.
- Widiyanto, Ahmad Arif , 2018, "Aktivisme, Filantropi Sosial dan Pemberdayaan Perempuan di Yogyakarta: Studi tentang Dinamika Aktivisme Yayasan Sahabat Ibu (YSI) dan dalam Pemberdayaan Perempuan di Yogyakarta". *Jurnal Sosiologi*, 12 (2)

Informan

Abdullah Alhdza

Ahmad Aljufri

Kamiluddin Kandacong

Muhammad Syukur